



# LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III

TAHUN 2024

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL  
PERIKANAN PALEMBANG

## KATA PENGANTAR

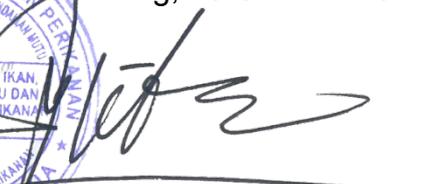
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan III Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan III Tahun 2024 disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan kinerja ini juga sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Stasiun KIPM Palembang dalam melaksanakan program dan kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan selama Tahun Anggaran 2024.

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka untuk memberikan informasi capaian kinerja secara terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai. Lebih lanjut, informasi kinerja dalam laporan ini berfungsi sebagai pengendalian atas perkembangan capaian Kinerja Stasiun KIPM Palembang dan menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja kedepan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini. Kami berharap kritik dan saran membangun untuk meningkatkan peran dan mutu Kinerja Stasiun KIPM Palembang dalam hal penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) dan pemberian advis (*Advisory Services*) pada pelaksanaan program dan kegiatan kerja untuk mendukung peran Kinerja Stasiun KIPM Palembang sebagai Katalisator Pembaharuan Kinerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Palembang, 15 Oktober 2024



  
Yoyok Fibrianto

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Stasiun KIPM Palembang menjalankan mandat untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan kementerian. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, Stasiun KIPM Palembang berupaya untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan kementerian bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan telah berjalan secara efektif, efisien, andal, dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Agar dapat berkontribusi secara efektif dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan KKP, pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan dilaksanakan dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terukur dengan mengacu kepada standar pengendalian dan pengawasan mutu yang berlaku.

Dalam rangka pencapaian tujuan, program yang ditetapkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPPMHKP Tahun 2024 adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif”. Keberhasilan program tersebut didukung melalui pencapaian kinerja pada Stasiun KIPM Palembang yang terdiri dari 3 (Tiga) Sasaran Kegiatan (Pengendalian mutu di Lingkungan Stasiun KIPM Palembang, Standarisasi Sistem Kepatuhan pada Stasiun KIPM Palembang dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP lingkup Stasiun KIPM Palembang) dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan III Tahun 2024 cukup memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 112,57% (Istimewa), dengan rincian dari 14 Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan dengan hasil sebanyak 5 Indikator Kinerja yang capaiannya melebihi target yang ditetapkan (>100%) dan sebanyak 2 Indikator Kinerja tercapai sesuai dengan target (100%), dan Sebanyak 7 yang belum ada target dan Realisasi pada Triwulan III.

Dari sisi kinerja keuangan, realisasi anggaran Stasiun KIPM Palembang Triwulan III Tahun 2024 dengan hasil yang sangat baik yaitu mencapai Rp.4.108.370.598 atau 64,33% dari alokasi anggaran Rp 6.386.307.000. Penggunaan sumber daya anggaran ini dapat dinilai cukup efisien karena dapat dihasilkan kinerja yang melebihi target (Skor Kinerja: 112,57%).

## DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.... Latar Belakang.....	1
B.... Dasar Hukum .....	2
C.... Tugas dan Fungsi .....	2
D.... Agenda Stasiun KIPM Palembang .....	3
E.... Sumber Daya .....	3
F.... Dasar Pelaporan Kinerja.....	5
G.... Tujuan Pengukuran Kinerja .....	5
H.... Ruang Lingkup.....	5
I.... Waktu Pengukuran Kinerja .....	5
J.... Metodologi Pengukuran Kinerja .....	5
K.... Sistematika Laporan .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>7</b>
A.... Rencana Strategis KKP dan BPPMHKP Tahun 2020 – 2024.....	7
B.... Rencana Kinerja Tahunan .....	9
C.... Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024.....	9
D.... Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>13</b>
A.... Pengelolaan Kinerja Stasiun KIPM Palembang .....	13
B.... Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palembang.....	13
C.... Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran.....	36
D.... Realisasi Rencana Aksi.....	37
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>40</b>
A.... Kesimpulan.....	40
B.... Rencana Perbaikan .....	40
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>41</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi Sumber Daya Manusia Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 .....	4
Tabel 2.	Perjanjian Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 .....	10
Tabel 3.	Matriks Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Triwulan III Tahun 2024 .....	11
Tabel 4.	Penilaian Capaian Kinerja .....	13
Tabel 5.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 .....	14
Tabel 6.	Realisasi IKU “Jumlah Sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan Stasiun KIPM Palembang” .....	16
Tabel 7.	Realisasi IKU “Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang” .....	18
Tabel 8.	Realisasi IKU “Sertifikat Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Produk)” .....	19
Tabel 9.	Realisasi IKU “Upi yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan” .....	19
Tabel 10	Realisasi IKU “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di UPT SKIPM Palembang (Nilai)” .....	20
Tabel 11	Realisasi IKU “Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup UPT SKIPM Palembang (Lokasi)” .....	21
Tabel 12	Realisasi IKU “Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Palembang (Indeks)” .....	25
Tabel 13	Realisasi IKU “Nilai Penilaian Mandiri satker Stasiun KIPM Palembang (Nilai)” .....	26
Tabel 14	Realisasi IKU “Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup BPPMHKP Lingkup SKIPM Palembang” .....	26
Tabel 15	Realisasi IKU “Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BPPMHKP Lingkup SKIPM Palembang” .....	37
Tabel 16	Realisasi IKU “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Palembang (Nilai)” .....	33
Tabel 17	Realisasi IKU “Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palembang SKIPM Palembang (Nilai)” .....	35
Tabel 18	Realisasi IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT SKIPM Palembang (%)” .....	35
Tabel 19	Realisasi IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup UPT SKIPM Palembang (%)” .....	36
Tabel 20	Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Triwulan III SKIPM Palembang Triwulan III Tahun 2024 .....	36
Tabel 21	Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan III SKIPM Palembang Tahun 2024 .....	37

Tabel 22 Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja SKIPM  
Palembang Tahun 2023 .....

38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi SKIPM Palembang Tahun 2024 .....	4
Gambar 2.	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) SKIPM Palembang 2024.....	14
Gambar 3	Nilai Rekomendasi Hasil Pengawasan pada Aplikasi SIDAK.....	27

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Arah kebijakan umum pengawasan nasional Tahun 2020-2024 tercantum pada beberapa misi Presiden RI Tahun 2020-2024 dalam mencapai visi Presiden RI Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”. Adapun beberapa misi Presiden RI dalam substansi kebijakan umum pengawasan nasional yaitu termaktub pada misi ke-6 “Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya” dan misi ke-8 “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”. Kebijakan dan Strategi dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola salah satu pilarnya adalah Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta pengawasan.

KKP sebagai organisasai yang membantu Presiden RI pada bidang kelautan dan perikanan, menetapkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2020-2024 sebagai visi dan misi KKP Tahun 2020-2024. Implementasi atas visi dan misi tersebut dilaksanakan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat dan memberi manfaat serta menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya bagi kepentingan bersama.

BPPMHKP sebagai bagian integral dari KKP sebagai unit Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP memiliki mandat untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi KKP melalui pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang KP agar sesuai dengan rencana dan tujuan serta sesuai dengan tata kelola yang baik dan berintegritas (*good governance*). Dengan peran strategis tersebut, BPPMHKP dituntut untuk dapat melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu secara profesional dan berkualitas.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan BPPMHKP, Stasiun KIPM Palembang selaku salah satu unit pelaksana kinerja BPPMHKP melakukan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik melalui mekanisme pelaporan kinerja untuk memastikan perkembangan capaian kinerja

sesuai dengan harapan selanjutnya menjadi dasar pengambilan kebijakan atau aksi yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditentukan. Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Palembang yang bertujuan untuk memberikan informasi atas berbagai capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas/fungsi selama satu tahun. Pelaporan kinerja dilakukan dengan evaluasi secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah dilakukan.

## **B. DASAR HUKUM**

Stasiun KIPM Palembang melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka organisasi Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP) menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM Palembang memiliki tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta

penyusunan laporan hasil terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan administrasi lingkup BPPMHKP.

Stasiun KIPM Palembang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

#### **D. AGENDA SKIPM PALEMBANG**

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional, sehingga dijadikan salah satu agenda pembangunan nasional. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain berupa penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dalam pemantapan tata kelola pemerintahan untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Selama ini, terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta masih rendahnya kualitas pelayanan umum.

#### **E. SUMBER DAYA**

1. Sumber Daya Manusia

Pada Triwulan III ini terjadi mutasi masuk ke Stasiun KIPM Palembang sehingga

dalam menjalankan tugas dan fungsi komposisi Sumberdaya Manusia Stasiun KIPM Palembang menjadi 33 orang pegawai dengan rincian disajikan pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024**

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala	1
2.	Kepala Urusan Umum	1
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	3
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	6
5.	Pengelola Keuangan	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
7.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	1
8.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Pelaksana	2
9.	Analisis Barang Milik Negara	1
10.	Analisis Keuangan	1
11.	Analisis SDM Aparatur	1
12.	Bendahara Pengeluaran	1
13.	Pengadministrasian Persuratan	1
14.	Pengadministrasian Umum	1
15.	Pengadministrasian Perkantoran	1
16.	PPNPN	6
17.	Outsourcing	4
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>

Struktur Organisasi Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 disajikan pada Gambar 1 berikut.

**Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024**



## 2. Sumber Daya Anggaran

Dalam rangka mendukung kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan, Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.386.307.000.

## **F. DASAR PELAPORAN KINERJA**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

## **G. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sesuai yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja Stasiun KIPM Palembang.

## **H. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pengukuran kinerja mencakup pengukuran dokumen Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 dan Rencana Aksi Kinerja yang diukur pada Tahun 2024.

## **I. WAKTU PENGUKURAN KINERJA**

1. Periode yang dinilai : Januari s.d. September 2024
2. Waktu pelaksanaan penilaian : Oktober 2024

## **J. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja Stasiun KIPM Palembang berdasarkan Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan III Tahun 2024;

2. Pengukuran atas Rencana Aksi pencapaian IKU Stasiun KIPM Palembang Triwulan III Tahun 2024.

#### **K. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyusunan laporan meliputi: 1) Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Dasar Hukum, Tugas dan Fungsi, Agenda Stasiun KIPM Palembang, Sumber Daya, Dasar Pengukuran Kinerja, Ruang Lingkup, Waktu Pengukuran Kinerja, Metodologi Pengukuran Kinerja dan Sistematika Laporan; 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang mencakup Rencana Strategis KKP dan BPPMHKP Tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan III Tahun 2024, Program dan Kegiatan Stasiun KIPM Palembang dan Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan; 3) Akuntabilitas Kinerja yang mencakup Pengelolaan Stasiun KIPM Palembang, Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palembang, Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Rencana Aksi; dan 4) Penutup yang mencakup kesimpulan dan rencana perbaikan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN BPPMHKP TAHUN 2020 - 2024**

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi yang ada di KKP, Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir dari Renstra KKP menjadi dasar bagi unit Eselon I dibawahnya untuk melakukan penajaman terkait dengan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan KKP.

Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Renstra Tahun 2020 - 2024 dan turunannya pada BPPMHKP sebagai salah satu unit Eselon I dibawahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

##### **1. Visi KKP dan BPPMHKP**

Visi KKP, bisa diartikan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah:

***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”***

Dengan Visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, BPPMHKP mempunyai visi :

***“Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan, gotong royong”***

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai KKP dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP.

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil BPPMHKP. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.

## 2. Misi BPPMHKP

Misi KKP dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi BPPMHKP, yaitu:

- **Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.**
- **Meningkatkan penerapan praktik yang baik disetiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.**
- **Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.**
- **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen BPPMHKP dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP antara lain: Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

## 3. Tujuan BPPMKP KKP

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi BPPMHKP. Adapun tujuan strategis BPPMHKP adalah:

**Mengendalikan dan Mengawasi Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan**

Tujuan yang ingin diwujudkan sudah pada tahapan yang tinggi yaitu efektifitas peran Pengendalian Mutu Perikanan. Keberhasilan capaian tujuan tersebut di indikasikan dengan capaian Sasaran Strategis.

#### **4. Sasaran Strategis**

Sebagai unit pengendalian dan pengawasan mutu, BPPMHKP mendukung pencapaian Visi dan Misi KKP melalui dua Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan KKP.
2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif

Sedangkan Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 adalah:

1. Terselenggaranya pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.
2. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BPPMHKP.

#### **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen tahun 2024, Stasiun KIPM Palembang melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.386.307.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP pada Stasiun KIPM Palembang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.495.307.000,-
2. Pengendalian Mutu alokasi anggaran sebesar Rp. 271.500.000,-
3. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan alokasi anggaran sebesar Rp. 619.500.000,-.

#### **C. PENETAPAN KINERJA SKIPM PALEMBANG TAHUN 2024**

Sebagai penjabaran dari sasaran kinerja BPPMHKP, Stasiun KIPM Palembang selaku unit Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan pada unit produksi dan penanganan atau pengolahan mendapatkan tanggung jawab untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dan telah ditetapkan target Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing sasaran Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 yang disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
1	Terselenggaranya pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah Sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (Sertifikat)	5
		2	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	2
		3	Sertifikat Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Produk)	4
		4	Upi yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5
Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan				
2	Terselenggaranya pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di UPT SKIPM Palembang (Nilai)	84
		6	Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup UPT SKIPM Palembang (Lokasi)	2
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP				
3	Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Palembang (Indeks)	86
		8	Nilai Rekonsiliasi Penilaian Mandiri Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	82
		9	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup BPPMHKP Lingkup SKIPM Palembang	100
		10	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BPPMHKP Lingkup SKIPM Palembang	80
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Palembang (Nilai)	93,75
		12	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palembang SKIPM Palembang (Nilai)	82
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT SKIPM Palembang (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup UPT SKIPM Palembang (%)	80

#### **D. RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**

Dalam rangka untuk mencapai sasaran kinerja sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Stasiun KIPM Palembang menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan Stasiun KIPM Palembang dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Matriks Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Palembang**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TW III 2024			
			T	R		
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu						
1	Terselenggaranya pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah Sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (Sertifikat)	Sertifikat	2	2
		2	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	Lokasi	-	-
		3	Sertifikat Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Produk)	Produk	4	6
		4	Upi yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	UPI	5	5
Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan						
2	Terselenggaranya pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di UPT SKIPM Palembang (Nilai)	Nilai	84	93,29
		6	Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup UPT SKIPM Palembang (Lokasi)	Lokasi	-	-
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP						
3	Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Palembang (Indeks)	Nilai	-	-
		8	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	Nilai	-	-
		9	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup BPPMHKP Lingkup SKIPM Palembang	%	-	-
		10	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BPPMHKP Lingkup SKIPM Palembang	%	80	94
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan	Nilai	-	-

		Anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Palembang (Nilai)			
	12	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palembang SKIPM Palembang (Nilai)	Nilai	-	-
	13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT SKIPM Palembang (%)	%	-	-
	14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup UPT SKIPM Palembang (%)	%	-	-

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGELOLAAN KINERJA SKIPM PALEMBANG

Pengelolaan kinerja merupakan sistem manajemen yang dilakukan organisasi di dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Tim pengelola kinerja Stasiun KIPM Palembang melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala (triwulan). Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi). Tingkat penilaian capaian kinerja disajikan pada Tabel 4 berikut:

**Tabel 4. Penilaian Capaian Kinerja**

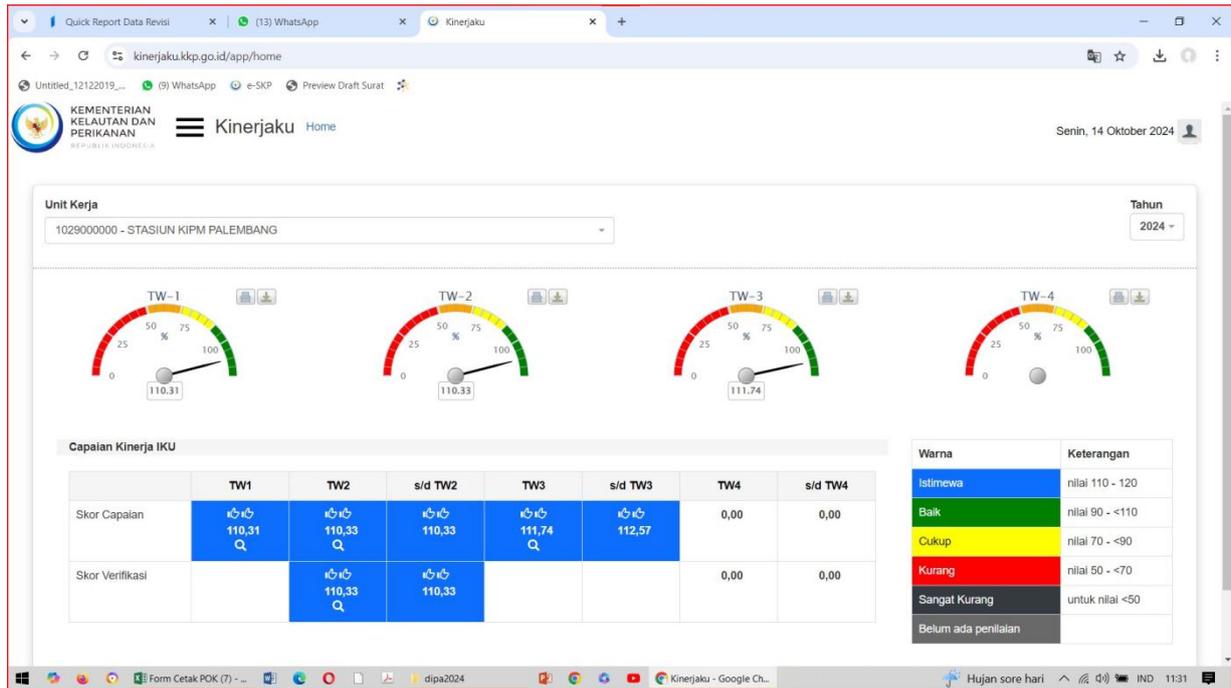
No	Kode Warna	Rentang Nilai	Arti
1.	Hijau	$\geq 100$	Baik
2.	Kuning	70 s.d <100	Cukup
3.	Merah	<70	Kurang
4.	Abu-Abu	Belum ada penilaian	
5.	Putih	Belum input capaian	

### B. CAPAIAN KINERJA SKIPM PALEMBANG

Capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan III Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Stasiun KIPM Palembang yang dilaksanakan dari bulan Januari - September 2024 yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi Indikator Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja (*kinerjaku*), Capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang disampaikan sebagaimana pada Gambar 2 berikut:

**Gambar 2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) SKIPM PALEMBANG Tahun 2024**



Berdasarkan pada Gambar 2 di atas, Nilai Kerja Organisasi (NKO) Stasiun KIPM Palembang Triwulan III Tahun 2024 dengan capaian **112,57% (kategori Istimewa)**. Secara rinci capaian indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Palembang disajikan pada Tabel 5 berikut:

**Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TRIWULAN III 2024			
		TARGET	REALISASI	%	
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu					
1 Terselenggaranya pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1 Jumlah Sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (Sertifikat)	2	2	100	
	2 Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	-	-	-	
	3 Sertifikat Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Produk)	4	6	150	
	4 Upi yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5	5	100	
Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan					

2	Terselenggaranya pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di UPT SKIPM Palembang (Nilai)	84	93,29	111,05
		6	Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup UPT SKIPM Palembang (Lokasi)	-	-	-
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP						
3	Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Palembang (Indeks)	-	-	-
		8	Nilai Penilaian Mandiri satker Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	-	-	-
		9	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup BPPMHKP Lingkup SKIPM Palembang	-	-	-
		10	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BPPMHKP Lingkup SKIPM Palembang	80	94	117,5
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Palembang (Nilai)	-	-	-
		12	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palembang SKIPM Palembang (Nilai)	-	-	-
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT SKIPM Palembang (%)	-	-	-
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup UPT SKIPM Palembang (%)	-	-	-

Berdasarkan Tabel 6 di atas, diketahui dari 14 Indikator Kinerja Kegiatan terdapat 5 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target dan terdapat 2 Indikator Kinerja yang realisasinya sesuai target, dan sebanyak 7 yang belum ada target dan realisasinya pada Triwulan III. Secara lebih rinci, gambaran capaian indikator kinerja kegiatan Stasiun KIPM Palembang Triwulan III Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

**SK-1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif**

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Patisipatif menjadi tolok uku dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Stasiun KIPM Palembang. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Partisipatif (Kegiatan Pengendalian Mutu) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang.

### **IK1. Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (sertifikat);**

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN.KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/*supplier* sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/*supplier* menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap sanitasi dan higiene penanganan ikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/*supplier*.

Dalam memberikan jaminan tersebut maka diperlukan kegiatan Inspeksi CPIB terhadap supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan (Quality and Safety Assurance) hasil perikanan yang diproduksi di Indonesia, Inspeksi CPIB terhadap Unit pengumpul/*supplier* dilaksanakan berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Hasil dari kegiatan Inspeksi CPIB pada Unit Pengumpul/*supplier* berupa Sertifikat hasil inspeksi CPIB yang diterbitkan apabila suatu unit penanganan ikan memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga aman untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut ataupun untuk dikonsumsi manusia. Indikator ini ditargetkan pada 5 Sertifikasi CPIB dan pada Triwulan III sudah tersertifikasi 2.

**Tabel 6 Target dan Realisasi IKU Jumlah Sertifikat CPIB supplier yang Diterbitkan pada Triwulan III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024					
	TW I	TW II	TW III	Target	Realisasi	%
Jumlah Sertifikat CPIB <i>supplier</i> yang diterbitkan (Sertifikat)	-	-	2	2	2	100

**IK2. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik Lingkup UPT SKIPM Palembang (Lokasi);**

Dalam rangka mendukung Intruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat Lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik antara lain: Unit pengumpulan/*supplier* dan pasar dikabupaten kota dengan tingkat konsumsi hasil perikanan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Hasil Perikanan yang menjadi objek pengendalian meliputi ikan segar dan beku golongan demersal, pelagic, cephalopoda, mullusca dan ikan hasil budidaya.

Untuk mengimplementasikan inpres dimaksud terkait mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan, maka perlu adanya peningkatan pengawasan mutu produk perikanan, dengan harapan produk perikanan yang dipasarkan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pada tahun 2024 Indikator ini ditargetkan sebanyak 2 lokasi, dan pada Triwulan III tahun 2024 merupakan kegiatan tahap 2, target lokasinya adalah lokasi yang sama dilakukan pada tahap I di triwulan I dan triwulan II dan target lokasi telah tercapai yaitu :

NO	TRIWULAN	PELAKSANAAN	
		LOKASI	LOKUS
1.	TW III	Kabupaten OKU Timur	1.PT. ASSA Martapura 2.Pasar Tradisional Martapura 3.Pasar Tradisional Gumawang 4.Pasar Tradisional Sidodadi
2.	TW III	Kota Prabumulih	1.HyFresh, Hypermart, City Mall 2.Pasar Tradisional Prabumulih

**Tabel 7 Target dan Realisasi IKU Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Dosmetik lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang Triwulan III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024					
	TW I	TW II	TW III	Target	Realisasi	%
Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Dosmetik lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	1	1	-	-	2	100

### **IK3. Sertifikat *Hazard Analisis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI ;**

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan, Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (*end product testing*).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Indikator sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan. Pada 2024 indikator ini ditargetkan 4 Sertifikat Produk, dan sudah terealisasi sebanyak 6 Produk pada triwulan sebelumnya yaitu:

<b>No</b>	<b>Nama UPI</b>	<b>No Sertifikat</b>	<b>Grade</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Masa Berlaku</b>
1.	CV. HONEY GROUP	073/PM/HACCP/PB/06/22	B	Frozen Pempek	17 Jni 2023
2.	PT. Lestari magris	182/PM/HACCP/PB/07/23	A	Frozen Froglegs	26 Jul 2023
3.	PT. Lestari Magris	183/PM/HACCP/PB/07/23	A	Frozen Shrimp	26 Jul 2023
4.	PT. Cek Molek	254/PM/HACCP/PB/08/23	C	Frozen Pempek	25 Ags 2023
5.	PT. Agung Jayasari Sakti	257/PM/HACCP/PB/08/23	A	Frozen Froglegs	25 Ags 2023
6.	CV. Pesona Musi	008/PM/HACCP/PB/12/23	B	Frozen Pempek	01 Des 2023

Capaian Indikator ini lebih sebesar 150 % dari target 4 Ruang lingkup produk, Kegiatan pendukung dalam mencapai target Indikator ini antara lain Infeksi dan Verifikasi HACCP Kepada UPI dan melakukan bimtek Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.

**Tabel 8 Target dan Realisasi IKU Sertifikat Hazard Analisis Critical Control Point HACCP pada Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024					
	TW I	TW II	TW III	Target	Realisasi	%
Sertifikat Hazard Analisis Critical Control Point HACCP (produk );	4	6	6	4	6	150

**IK4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI);**

UPI yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan UPI yang telah memenuhi dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi Persyaratan dasar. Penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan Penerapn sistem ketertelusuran Indikator kegiatan ini sudah dilaksanakan di Triwulan II sebanyak 5 UPI.

**Tabel 9 Target dan Realisasi IKU UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024					
	TW I	TW II	TW III	Target	Realisasi	%
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	5	5	5	5	5	100

**SK-2 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif**

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BPPMHKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur kebrhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Standarisasi dan Sistem Kepatuhan) lingkup UPT SKIPM Palembang

## **IK5. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM**

### **Palembang (nilai);**

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik Pengukuran Indeks kepuasan masyarakat Di UPT Lingkup BKIPM Menggunakan elektronik SKP (*e-survey SKM*) Masyarakat atau pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh pengguna jasa di masing-masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan; sistem; prosedur; waktu pelayanan; biaya/tarif; produk spesifikasi; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan; dan sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari 47 UPT lingkup BKIPM.

Survey kepuasan pelanggan di laksanakan oleh Stasiun KIPM Palembang dilakukan setiap triwulan, berikut hasil survey kepuasan pelanggandi Triwulan III.

**Tabel 10 Target dan Realisasi IKU Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Palembang pada Triwulan III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024					
	TW I	TW II	TW III	Target	Realisasi	%
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Palembang (nilai)	93,19	93,28	93,29	84	93,29	111

## **IK6. Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT SKIPM Palembang (Lokasi);**

Melaksanakan Verifikasi *Quality Assurance* (penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) pada proses Pembudidayaan ikan (Pembenihan, Pembesaran) apakah sudah memenuhi Persyaratan /Standar di lokasi Kawasan/Kampung Budidaya.

Pada Tahun 2024 Target Indikator ini adalah 2 , dan pada triwulan III tahun 2024 tidak ada realisasi dan akan ditergetkan pada Triwulan berikutnya.

**Tabel 11 Target dan Realisasi IKU Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT pada Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024					
	TW I	TW II	TW III	Target	Realisasi	%
Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT SKIPM Palembang (Lokasi)	-	-	-	-	-	-

**SK-3 Tatakelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP**

**IK7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Palembang (Indeks);**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB NO, 38 Tahun 2018), Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun Oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
  - a. Kualifikasi
  - b. Kompetensi
  - c. Kinerja
  - d. Disiplin

2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) / D4 (Diploma-Empat)
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM(Sarjana Muda)
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) / D-2 (Diploma-Dua) / SLTA Sederajat
- f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan SI	15
2	Pendidikan D 111 /SM	10
1	Pendidikan D 11/0 1/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran UP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi sesuai Jâbatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi labfung	Kompetensi staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-

0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsioanal	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	<b>Total Mengikuti Kompetensi</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
  - Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 — ke atas	30
2	Baik	76 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Perhitungan nilai DIKLAT PIM Diklat Fungsional/Teknis, Dildat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
  - ii. Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40

Indikator indeks profesionalitas ASN SKIPM Palembang dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen, Pada tahun 2024 Indikator ini mempunyai target 82, indikator target semester dan telah direalisasikan pada Triwulan II.

**Tabel 12 Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palembang pada Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024					
	TW I	TW II	TW III	Target	Realisasi	%
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palembang (Indeks);	-	90,39	-	86	90,39	105,10

### **IK8. Penilaian Mandiri satker Stasiun KIPM Palembang (Nilai);**

Penilaian Mandiri satker merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing - masing indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan menggunakan formula:

A. Penghitungan Penilaian Mandiri Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu:

- a. Aspek Kepatuhan (A-1): Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi: PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW Is.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III.
- b. Aspek Kesesuaian (A-11): Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data
- c. Aspek Ketercapaian (A-111): Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2023 pada aplikasi kinerjaku.

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian mandiri. Pada tahun 2024 Nilai rekonsiliasi kinerja UPT Stasiun KIPM Palembang dengan target 82 dan belum ada realisasi Perhitungannya karena dihitung secara tahunan.

**Tabel 13 Target dan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja satker Stasiun KIPM Palembang pada Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024					
	TW I	TW II	TW III	Target	Realisasi	%
Nilai Rekonsiliasi Kinerja satker Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	-	-	-	-	-	-

**IK9. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup SKIPM Palembang (%);**

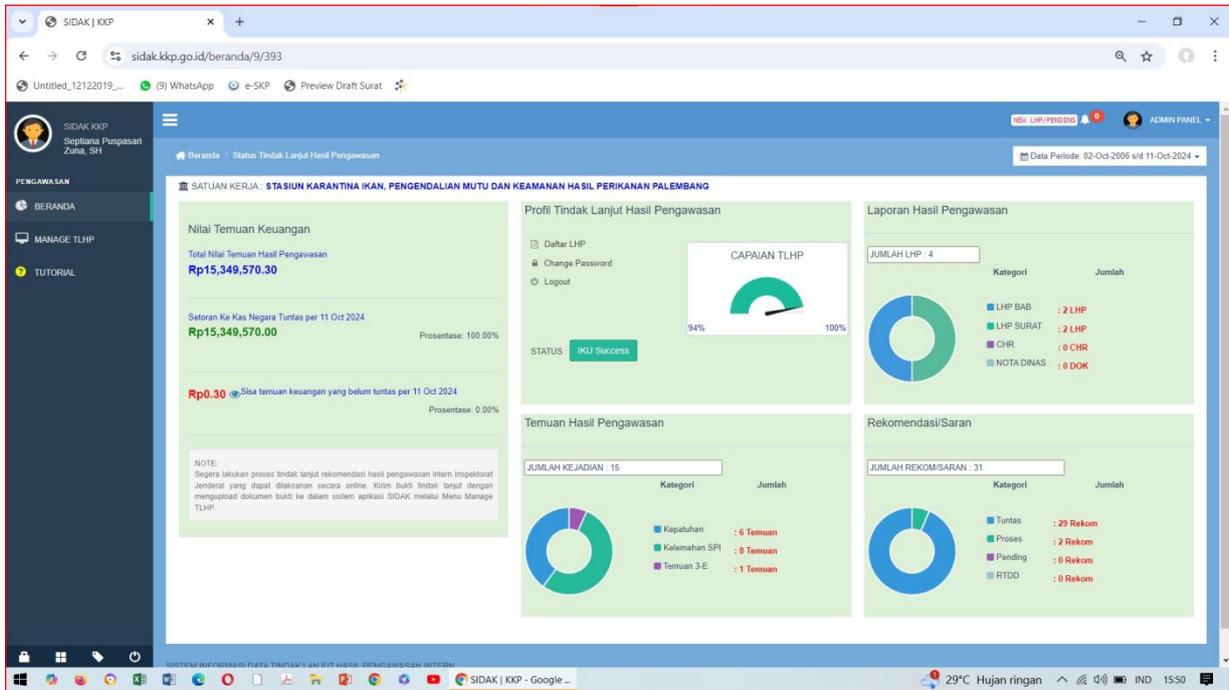
Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan efektifitas system pengendalian intern. Pada tahun 2024 indikator ini ditargetkan 100% dan pada triwulan III tahun 2024 belum ada target realisasi, karena perhitungannya dilakukan tahunan.

**Tabel 14 Target dan Realisasi IK9 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup SKIPM Palembang Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024					
	TW I	TW II	TW III	Target	Realisasi	%
Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup SKIPM Palembang	-	-	-	-	-	-

**IK10. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Palembang (%);**

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) yang telah ditindaklanjuti berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Inspektorat Jenderal. Pada Tahun 2024 Indikator ini ditargetkan sebesar 80%, Berdasarkan data SIDAK Inspektorat Jenderal, menunjukan Bahwa Stasiun KIPM Palembang Pada Triwulan III Tahun 2024 telah menuntaskan 100% Perbaikan, Nilai Rekomendasi hasil pengawasan SKIPM Palembang dapat dilihat pada gambar berikut



**Gambar 10 . Nilai Rekomendasi hasil pengawasan pada aplikasi SIDAK**

**Tabel 15 Target dan Realisasi IKU Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Palembang pada Triwulan III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024					
	TW I	TW II	TW III	Target	Realisasi	%
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Palembang (%);	100	100	94	80	94	117,5

**IK11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Palembang (Nilai);**

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4(empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;
- b. Baik, apabila  $89 \leq$  nilai IKPA  $< 95$ ;
- c. Cukup apabila  $70 \leq$  nilai IKPA  $< 89$ ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA  $> 70$

## FORMULA PERHITUNGAN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker /Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^n (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobor Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

### 1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
- Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

### 2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan

- Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap Triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemuktahiran 10 hari kerja bulan Februari
- Semakin rendah deviasi antar realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

Belanja Pegawai

$$\text{DevDIPA BPeg} = \frac{||R \text{BPeg } n - \text{RPD BPeg } n||}{\text{RPD B Peg } n} \times 100$$

Belanja Barang

$$\text{DevDIPA BBar} = \frac{||R \text{BBar } n - \text{RPD BBar } n||}{\text{RPD B Bar } n} \times 100$$

Belanja Modal

$$\text{DevDIPA BMod} = \frac{||R \text{BMod } n - \text{RPD BMod } n||}{\text{RPD B Mod } n}$$

Seluruh Jenis Belanja

$$\text{DevDIPA } n = \frac{||\text{DevDIPA BPeg} + \text{DevDIPA BBar} + \text{DevDIPA BMod}||}{3}$$

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	100%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

### 3. Penyerapan Anggaran- Bobot Penilaian 20%

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melapau target, semakin baik
- Target Penyerapan masing-masing belanja

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg \text{ Tw ke } - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar \text{ Tw ke } - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod \text{ Tw ke } - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$NKPA_n = \frac{(PA_n)}{(TP_n)} \times 100$$

#### 4. Belanja Kontraktual -Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%). (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapatkan nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapatkan poin 100. Triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA BK = (NK - Kw * 40\%) + (NK Dini * 30\%) + (NK BM * 30\%)$$

#### 5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja)
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual

- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left( \frac{SPM \ LS \ TW}{SPM \ LS} \right) \times 100$$

#### 6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antar Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan Waktu (50%). (2) Komponen Persentase GUP (25%). Dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- Komponen Ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP+nPTUP}$$

- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disembulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

%GUP disembulankan = % GUP x (jml hari sebulan)/Δt GUP

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{Setoran \ TUP}{TUP} \times 100$$

- Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

#### 7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antar jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya

pada triwulan IV.

- Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagai berikut:
- Rasio Dispensasi (permil)

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit(Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

#### 8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya.

$$NK - CRO = \left( \frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right)$$

- Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NK CRO \times 70\%)$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi.

Pada Triwulan III Tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 83, dan terealisasi sebesar 89,83 (Sangat Baik) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 16 Target dan Realisasi IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Palembang pada Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024					
	TW I	TW II	TW III	Target	Realisasi	%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Palembang (Nilai);	-	89,83	-	83	89,83	108,22

**IK12. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palembang (Nilai);**

- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.
- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangkapeleaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terj adi dalam Pemangku Kepentingan se bagai penerima manfaat atas penggunaan anggaranpada program Kernenterian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
- Pembobotan Nilai Kinerja Anggaran antara lain:
  - a. Aspek manfaat dan implementasi 50%
  - b. Rata-rata satker 50%
- Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain
  - a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
  - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
  - c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
  - d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;

e. Sangat Kurang, apabila  $\leq 50$

## FORMULASI PERHITUNGAN

### *Formula Aspek Implementasi*

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO} + (NE \times W_E)$$

Keterangan :

NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi

P : penerapan anggaran

K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP : capaian output program

CRO : capaian ro

NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan anggaran kerja

Wp : bobot penerapan anggaran

Wk : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Wcop : bobot capaian Output Program

Wcro : bobot capaian RO

Pada tahun 2024 indikator ini mempunyai target sebesar 82, dan Pada Triwulan III tahun 2024 belum ada target dan realisasi karena perhitungannya dilakukan tahunan.

**Tabel 17 Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palembang pada Triwulan III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024					
	TW I	TW II	TW III	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palembang (Nilai);	-	-	-	-	-	-

### **IK13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun KIPM Palembang (%)**

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/lasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%),
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Indikator ini merupakan IKU baru pada tahun 2022, pada tahun-tahun sebelumnya belum ada. Pada tahun 2024 target indikator ini sebesar 80 dan pada triwulan III tahun 2024 belum ada target dan capaian, karena perhitungannya dilakukan tahunan

**Tabel 18 Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Palembang pada Triwulan III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024					
	TW I	TW II	TW III	Target	Realisasi	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Palembang (%);	-	-	-	-	-	-

#### **14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup SKIPM Palembang (%)**

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BKIPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga Triwulan 4 tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2018-2023 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%)
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Indikator ini merupakan IKU baru pada tahun 2022, sehingga pada tahun-tahun

sebelumnya belum ada. Pada tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 80 %, dan pada Triwulan III tahun 2024 belum ada target dan capaian, karena perhitungannya dilakukan tahunan.

**Tabel 19 Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup SKIPM Palembang pada Triwulan III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024					
	TW I	TW II	TW III	Target	Realisasi	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup SKIPM Palembang	-	-	-	-	-	-

### C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ANGGARAN

#### 1. Realisasi Anggaran Kegiatan

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Palembang pada tahun anggaran (TA) 2024 pada DIPA sebesar Rp. 6.386.307.000,- Realisasi Penyerapan anggaran pada Triwulan III Tahun 2024 Mencapai Rp.4.108.370.598,- atau sebesar 64,33 % Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Palembang Triwulan III berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 20. Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Triwulan III Tahun 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP pada Stasiun KIPM Palembang	5.495.307.000,-	4.021.349.591,-	73,18
2	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	271.500.000,-	64.609.816,-	23,80
3	Manajemen Mutu	619.500.000,-	22.411.191,-	3,62
<b>Total</b>		<b>6.386.307.000,-</b>	<b>4.108.370.598</b>	<b>64,33</b>

**Tabel 21. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Stasiun KIPM Palembang  
Triwulan III Tahun 2024**

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.508.800.000,-	2.829.045.570,-	80,63
2	Belanja Barang	2.877.507.000,-	1.279.325.028	44,46
3	Belanja Modal	0	0	0
<b>Total</b>		<b>6.386.307.000,-</b>	<b>4.108.370.598,-</b>	<b>64,33</b>

#### **D. REALISASI RENCANA AKSI**

Rencana aksi merupakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai target yang ditetapkan, yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu. Setiap indikator kinerja disertai dengan target yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai. Untuk mencapai target indikator kinerja, dapat dilaksanakan langkah-langkah pencapaian target indikator kinerja kegiatan dijabarkan yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Aksi.

Rencana aksi tersebut disajikan dalam jenis kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara periodik (triwulanan) sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 dapat disampaikan bahwa seluruh rencana aksi atau kegiatan yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian target kinerja Stasiun KIPM Palembang dapat dilaksanakan seluruhnya. Secara rinci realisasi rencana aksi pencapaian target indikator kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 disajikan pada Tabel 22 berikut:

**Tabel 22. Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	No	Kegiatan Pendukung	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		2024		% Realisasi
						T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
1	Terselenggaranya Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	5	1	Jumlah Sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (Sertifikat)	Sertifikat	-	-	-	-	2	2					100%
		2	2	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	Lokasi	1	1	1	1	-	-					100%
		4	3	Sertifikat Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Produk)	Produk	4	6	4	6	4	6					150%
		5	4	UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	UPI	5	5	5	5	5	5					100%
2	Terselenggaranya pengendalian dan Pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	84	5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di UPT SKIPM Palembang (Nilai)	Nilai	84	93,19	84	93,28	84	93,29					111%
		2	6	Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup UPT SKIPM Palembang	Lokasi	-	-	-	-	-	-					-
3	Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP	84	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Palembang (Indeks)	Nilai	-	-	84	90,39	-	-					107,60%
		82	8	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	Nilai	-	-	-	-	-	-					-
		100	9	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP Lingkup Stasiun KIPM Palembang	%	-	-	-	-	-	-					-
		80	10	Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Lingkup (%)	%	80	100	80	100	80	94					117,5%
		93,75	11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	Nilai	-	-	83	89,83	-	-					108,22%
		82	12	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palembang (Nilai)	Nilai	-	-	-	-	-	-					-
		80	13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang /Jasa Lingkup UPT SKIPM Palembang (%)	%	-	-	-	-	-	-					-
		80	14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	%	-	-	-	-	-	-					-

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan III Tahun 2024 antara lain:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan III Tahun 2024 cukup memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau nilai rata-rata kinerja organisasi yang mencapai 112,57%;
2. Nilai kinerja organisasi merupakan rata-rata capaian 3 (tiga) Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Palembang yang diukur keberhasilannya dengan 14 Indikator Kinerja Kegiatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan dapat dicapai melebihi target dan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan target dan sebanyak 7 (tujuh) yang belum ada target dan realisasinya pada triwulan III;
3. Dari sisi kinerja keuangan, realisasi anggaran Stasiun KIPM Triwulan III Tahun 2024 dengan hasil yang sangat baik yaitu sebesar Rp.4.108.370.598,- atau 64,33% dari alokasi anggaran Rp.6.386.307.000,-. Jika realisasi tersebut dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang yang mencapai 112,57% maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran Stasiun KIPM Palembang cukup efisien karena dengan penggunaan anggaran yang lebih kecil/sedikit dapat menghasilkan capaian kinerja yang lebih tinggi.

### **B. Rencana Perbaikan**

Terhadap kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan kedepan, Stasiun KIPM Palembang akan melakukan langkah perbaikan yaitu akan dilakukan percepatan target dan realisasi yang belum ada pada Triwulan berikutnya.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Ministry of Marine Affairs And Fisheries  
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
Fish Quarantine And Inspection Agency  
**SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER**  
Certificate of "Good Handling and Manufacturing Practices" In The Supplier  
No. 002/CPIB/8/IX/2024

Menetapkan bahwa

To certify that

Unit Suplier : Ahmad Pausi  
The Supplier

Alamat : Dusun III RT.RW : 000/000 Kelurahan Jejawi, Kecamatan Jejawi,  
Address Kabupaten Ogan Komering Ilir

Jenis Produk : Paha Kodok  
Type of Product(s)

Tahapan Penanganan/Pengolahan : Penerimaan Bahan Baku - Penimbangan - Pemotongan - Pengupasan - Pencucian I  
Handling/Processing Step - Pengguntingan - Pencucian II - Penampungan - Distribusi/Pengiriman

Klasifikasi : Cukup  
Classification

Tanggal Inspeksi : 30 Agustus 2024  
Date of Inspection

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di suplier  
*Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier*

Berlaku sampai : 05 September 2028  
Valid until

Dikeluarkan di : Palembang  
Issued in

Tanggal : 05 September 2024  
On

Yoyok Librianto, SE., S.Pi., M.Pi  
Kepala UPT KIPM Palembang

Head of FQA's Technical Implementation Unit Palembang



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Ministry of Marine Affairs And Fisheries  
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
Fish Quarantine And Inspection Agency  
**SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPLIER**  
Certificate of "Good Handling and Manufacturing Practices" In The Supplier  
No. 001/CPIB/8/IX/2024

Menetapkan bahwa  
To certify that

Unit Suplier  
The Supplier

: Maslena Wati

Alamat  
Address

: Tugu Jaya RT.002 Kelurahan Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komereng Ilir

Jenis Produk  
Type of Product(s)

: Paha Kodok

Tahapan Penanganan/Pengolahan  
Handling/Processing Step

: Penerimaan Bahan Baku - Penimbangan - Pemotongan - Pengupasan - Pencucian I - Pengguntingan - Pencucian II - Penampungan - Distribusi/Pengiriman

Klasifikasi  
Classification

: Cukup

Tanggal Inspeksi  
Date of Inspection

: 28 Agustus 2024

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di suplier

*Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier*

Berlaku sampai : 05 September 2028  
Valid until

Dikeluarkan di : Palembang  
*Issued in*

Tanggal : 05 September 2024  
*On*

Yoyo Fibrianto, SE., S.PI., M.PI.  
Kepala UPT KIPM Palembang

Head of PQIA's Technical Implementation Unit Palembang